

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN PP NO 12 TAHUN 2019  
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**FAIRUZ HUMAIDA**  
NIM : 15520129

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN PP NO 12  
TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:  
**FAIRUZ HUMAIDA**  
NIM : 15520129

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN PP  
NO 12 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANG AN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BLITAR)

SKRIPSI

Oleh

FAIRUZ HUMAIDA

NIM: 1 5 5 2 0 1 2 9

Telah disetujui pada tanggal 19 November 2020

**Dosen Pembimbing**

**Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA.,AP.,CSRS.,CSRA.,CFrA**  
**NIP : 19771025 200901 2 006**

Mengetahui  
**Ketua Jurusan,**

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.SI., A ,CA**  
**NIP : 19720322 200801 2 005**



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fairuz Humaida

NIM : 15520129

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014-2018 BERDASARKAN PP NO 12 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 November 2020



Fairuz Humaida

NIM : 15520129

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepersembahkan kepadaMu Ya Allah. Atas takdirMu saya bisa menjadi seseorang yang berilmu, beriman, bersabar. Atas rahmatMu yang berlimpah merupakan karunia yang sangat berharga bagi saya dalam menjalani hidup di dunia ini sebagai bekal di akhirat kelak.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Bapak dan Mama saya. Terimakasih atas do'a yang tak berkesudahan, kasih sayang, dan segala hal telah dilakukan untuk saya selama saya lahir hingga sekarang.

Terimakasih untuk akung dan uti saya yang telah mendukung dan mendo'akan saya, seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendo'akan saya. Semua hal yang telah kalian lakukan sangat berarti untuk saya.

Terimakasih untuk sahabat saya Fadhilah Kurniawati Agustiningtyas yang telah memberi saya semangat dan mendengarkan keluh kesah saya dari masa MAN bahkan sampai sekarang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Tak lupa juga teman-teman Akuntansi angkatan 2015 khususnya Mbak Rahma, Mbak Anggi dan Silvi yang membantu saya.

Dan terakhir terimakasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Semoga kehidupan anda semua diberikan kemudahan, aamiin...

## MOTTO



*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”*

*(QS. Al-Insyirah: 5-6)*

*“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan Sholat”*

*(QS Al-Baqarah: 45)*

*Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur*

*-Hasan Al-Bashri*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018 Berdasarkan PP no.12 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)”

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFrA., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang ikhlas meluangkan waktunya dan selalu memberikan bimbingan terbaik untuk penulis.
5. Kepada kedua orang tua Bapak dan Mama yang tak hentinya mendo’akan dan memberikan dukungan kepada penulis.



6. Kepada para bapak dan ibu dosen Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan informasi yang dibutuhkan penulis
7. Teman-teman angkatan 2015 Jurusan Akuntansi universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
8. Seluruh pihak yang bersangkutan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah memberikan segalanya kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 29 November 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Praktis .....	5
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	6
1.5. Batasan Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teoritis .....	13
2.2.1 Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	13
2.2.2 Keuangan Daerah .....	14
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	17
2.2.3.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	17
2.2.3.2 Prosedur Pelaksanaan Anggaran.....	18
2.2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	19
2.2.5 <i>Value for Money</i> .....	21
2.2.5.1 Ekonomi.....	21
2.2.5.2 Efisiensi .....	21
2.2.5.3 Efektivitas.....	22
2.2.6 Kinerja.....	22
2.2.6.1 Indikator Kinerja, Tolok Ukur Kinerja dan Sasaran Kinerja...	23
2.2.6.2 Tujuan Penilaian Kinerja Di Sektor Publik.....	25
2.2.7 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	25

2.2.7.1	Derajat Desentralisasi .....	26
2.2.7.2	Rasio Kemandirian Daerah .....	27
2.2.7.3	Rasio Efektivitas .....	28
2.2.7.4	Rasio Efisiensi.....	29
2.2.8	Kinerja Menurut Islam .....	30
2.3	Kerangka Konseptual.....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	37
3.2	Lokasi Penelitian.....	38
3.3	Subyek Penelitian .....	38
3.4	Data Dan Jenis Data.....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6	Analisis Data.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1	Paparan Data.....	42
4.1.1	Latar Belakang BPKAD Kabupaten Blitar .....	42
4.1.2	Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Blitar .....	42
4.1.3	Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar.....	43
4.1.4	Ruang Lingkup Kegiatan BPKAD Kabupaten Blitar .....	45
4.1.4.1	Kepala Badan.....	46
4.1.4.2	Sekretariat.....	46
4.1.4.3	Sub Bagian Penyusunan Program.....	46
4.1.4.4	Sub Bagian Keuangan .....	47
4.1.4.5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .....	47
4.1.4.6	Bidang Anggaran.....	48
4.1.4.7	Bidang Anggaran I.....	48
4.1.4.8	Bidang Anggaran II .....	49
4.1.4.9	Bidang Anggaran III.....	49
4.1.4.10	Bidang Akuntansi.....	50
4.1.4.11	Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Pasal 15 .....	50
4.1.4.12	Sub Bidang Akuntansi Pelaporan.....	51
4.1.4.13	Sub Bidang Evaluasi.....	51
4.1.4.14	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.....	52
4.1.4.15	Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan .....	52
4.1.4.16	Sub Bidang Pengelolaan Kas.....	53
4.1.4.17	Bidang Pengeloaan Aset Daerah .....	53
4.1.4.18	Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah .....	54
4.1.4.19	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Pasal 24.....	54
4.1.4.20	Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah ..	

.....	55
4.1.4.21 Kelompok Jabatan Fungsional .....	55
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
4.2.1 Kinerja Keuangan Daerah dengan Analisis Derajat Desentralisasi. .....	56
4.2.2 Kinerja Keuangan Dearah dengan Analisis Rasio Kemandirian Daerah .....	59
4.2.3 Kinerja Keuangan Daerah dengan Analisis Rasio Efektivitas .....	61
4.2.4 Kinerja Keuangan Daerah dengan Analisis Rasio Efisiensi .....	63
4.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berdsarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 .....	65
4.3 Pembahasan .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2.2 Tabel Kategori Dearajat Desentralisasi Keuangan Daerah .....	26
Tabel 2.3 Tabel Kategori Rasio Kemandirian Keangan Daerah .....	27
Tabel 2.4 Tabel Kategori Rasio Efektivitas .....	28
Tabel 2.5 Tabel Kategori Rasio Efisiensi.....	29
Tabel 4.1 Perhitungan Derajat Desentralisasi Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018.. .....	56
Tabel 4.2 Tabel Kategori Derajat Desentraisasi Keuangan Daerah .....	57
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014- 2018 .....	59
Tabel 4.4 Tabel Kategori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	59
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018 .....	61
Tabel 4.6 Tabel Kategori Rasio Efektivitas .....	62
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018.... .....	64
Tabel 4.8 Tabel Kategori Rasio Efisiensi.....	64
Tabel 4.9 Tabel Analisis Surpluls APBD dan Defisit APBD .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumus Derajat Desentralisasi .....	26
Gambar 2.2 Rumus Rasio Kemandirian Daerah .....	27
Gambar 2.3 Rumus Rasio Efektivitas .....	28
Gambar 2.4 Rumus Rasio Efisiensi .....	29
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 ACC Tempat Penelitian

Lampiran 3 Laporan Realisasi APBD Tahun 2015 dan 2014

Lampiran 4 Laporan Realisasi APBD Tahun 2016 dan 2015

Lampiran 5 Laporan Realisasi APBD Tahun 2017 dan 2016

Lampiran 6 Laporan Realisasi APBD Tahun 2018 dan 2017

Lampiran 7 Biodata Peneliti



## ABSTRAK

Humaida, Fairuz. 2020. SKRIPSI Judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018 Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFrA

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi

---

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Blitar dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang telah dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2014-2018 berdasarkan pada PP No.12 Tahun 2019

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode campuran dengan teknik analisis hasil laporan keuangan. Data-data yang didapat berasal dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan merupakan data bentuk primer dan peraturan dalam PP No. 12 Tahun 2019 sebagai dasar penilaian kinerja.

Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam rasio kemandirian dinilai masih kurang dan peran pemerintah pusat masih dominan. Pada penelitian dengan menggunakan rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dinilai sudah bagus dan efektif. Hasil penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dinilai sudah efisien. Berdasarkan hasil analisis mengenai surplus dan defisit APBD, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dinilai mengalami surplus pada tahun 2014 dan 2015 sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 keuangan mengalami defisit namun pada tahun 2018 kinerja keuangan mengalami surplus kembali.



## ABSTRACT

*Humaida, Fairuz. 2020. THESIS. Title: Analysis of financial Performance of Regional Government of Blitar Regency in 2014-2018 Based on PP No.12 of 2019 (Case Study at the Regional Financial and Asset Management Agency of Blitar Regency)*

*Mentor : Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFrA*

*Keywords : financial performance, independence, effectiveness, efficiency.*

---

*The purpose of this research is to analyze the financial performance of Blitar Regency as seen from the Regional Government Financial Report of Blitar Regency which has been done by the Regional Financial and Asset Management Agency of Blitar Regency in 2014-2018 based on PP No,12 of 2019.*

*This research is using mixed method with analysis techniques of financial report result. The data obtained from the financial statement of Blitar Regency Government and it is a primary form data and using regulation in PP No.12 of 2019 as basis for performance appraisal.*

*The results of this study are the financial performance of the Blitar Regency Government in the ratio of independence is still considered insufficient and the role of the central government is still dominant. In a study using effectiveness ratios, the financial performance of the Blitar Regency Government is considered to be good and effective. The results of the study using the efficiency ratio, the financial performance of the Blitar Regency Government is considered to be efficient. Based on the results of an analysis of APBD surpluses and deficits, the financial performance of the Blitar Regency Regional Government is considered to have a surplus in 2014 and 2015, while in 2016 and 2017 the financial deficit was recorded, but in 2018 the financial performance experienced a surplus again.*

## التلخيص

حميدا، فيرؤز. ٢٠٢٠. البحث الجامعي. عنوان البحث: تحليل الأداء المالي لحكومة إقليم بليتار ريجنسي في ٢٠١٤-٢٠١٨ مرتكز على اللوائح الحكومية رقم ١٢ عام ٢٠١٩ (دراسة حالة في الوكالة الإقليمية المالية وإدارة الأصول في منطقة بليتار)

المشرفة : يونا اوكتياني ليستاري المجستير  
كلمات البحث : الأداء المالي ، الاستقلالية ، الفعالية ، الكفاءة

الغرض من هذا البحث هو تحليل الأداء المالي الإقليمي لشركة بليتار ريجنسي كما يتضح من البيانات المالية لحكومة بليتار ريجنسي الإقليمية التي أجرتها وكالة إدارة الأصول والمالية الإقليمية في بليتار ريجنسي في ٢٠١٤ - ٢٠١٨ مرتكز على ( PP No.12 Tahun 2019 ) اللوائح الحكومية رقم ١٢ عام ٢٠١٩.

هذا البحث عبارة عن بحث يستخدم طرق مختلطة مع تقنيات تحليل نتائج التقارير المالية. البيانات التي تم الحصول عليها جاءت من التقارير المالية الحكومية حي بليتار وهي بيانات النموذج الأساسي و اللوائح في اللوائح الحكومية رقم ١٢ عام ٢٠١٩ كأساس لتقييم الأداء.

نتائج هذه الدراسة هي الأداء المالي لحكومة بليتار ريجنسي في نسبة الاستقلال لا تزال تعتبر غير كافية ودور الحكومة المركزية لا يزال هو المهيمن. في دراسة تستخدم نسب الفعالية ، يعتبر الأداء المالي لحكومة بليتار ريجنسي جيداً وفعالاً. نتائج الدراسة باستخدام نسبة الكفاءة ، يعتبر الأداء المالي لحكومة بليتار ريجنسي فعالاً. بناءً على نتائج تحليل فوائض وعجز موازنة الدخل والنفقات ، تم اعتبار الأداء المالي لحكومة إقليم بليتار ريجنسي فائضاً في عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ ، بينما كان العجز المالي في عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ في حالة عجز ولكن في عام ٢٠١٨ شهد الأداء المالي فائضاً مرة أخرى.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peraturan mengenai otonomi daerah telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 yaitu “Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah”. Inti dari pasal tersebut adalah bahwa pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri yang berdasarkan atas asas otonomi dan dilakukan sebagai tugas pembantuan. Sejak masa kemerdekaan hingga sekarang otonomi daerah sudah menjadi bagian penting bagi kemajuan Negara. Peraturan mengenai bagaimana pelaksanaan otonomi daerah juga terus berkembang dengan adanya berbagai undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin Negara maupun pemimpin daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melaksanakan desentralisasi sebagai bentuk penyerahan usaha Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam memaksimalkan otonomi daerah, pemerintah daerah sangat berperan penting untuk menjadikan daerah yang diaturnya menjadi lebih baik. Di Indonesia setiap daerah memiliki peran untuk

mengatur daerahnya karena adanya kebijakan otonomi daerah ini. Tata kelola pemerintahan daerah mengalami perkembangan dari segi ekonomi maupun sosial. Pemerintah daerah memprioritaskan perkembangan pada bidang ekonomi dan sosial untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.

Pemerintah daerah melakukan kinerja untuk mencapai target pembangunan ekonomi dan sosial. Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan, sasaran dan visi misi organisasi (Sujarweni, 2015:107). Salah satu kinerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan daerahnya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah. Acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah merupakan bagian penting bagi sebuah pemerintah daerah dalam melakukan otonominya. Tingkat kemampuan sebuah daerah dapat diukur dengan menilai kinerja keuangan daerah (Pauwah dkk, 2015:4). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa informasi keuangan memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Laporan keuangan daerah meliputi: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menganalisis bagian dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pengukuran kemampuan kinerja pemerintahan daerah perlu menggunakan standar apakah daerah

tersebut mandiri, efektif, dan efisien. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio. Menurut Mahmudi (2016:163), analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara dua angka yang diambil dari laporan keuangan untuk menilai kinerja laporan keuangan dari tahun ke tahun. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mengukur kemampuan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Hasil dari analisis dapat digunakan sebagai bahan revidi bagi pemerintahan daerah sebagai acuan perencanaan keuangan pada periode selanjutnya.

Di berbagai daerah di Indonesia hasil kinerja keuangan daerah yang dilakukan memiliki hasil yang bervariasi. Terdapat beberapa daerah yang kinerja keuangan daerahnya memiliki hasil yang kurang maksimal sehingga berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut maupun kinerja keuangan pemerintah daerah yang sudah maksimal sehingga tingkat kemakmuran masyarakatnya tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu terdapat pada pendapatan dan belanja daerah. Jika suatu daerah mendapatkan pendapatan yang tinggi dibandingkan belanjanya maka kinerja keuangan daerah tersebut dapat dikatakan sudah baik. Dan sebaliknya jika belanjanya lebih banyak daripada pendapatannya maka kinerja keuangan dapat dikatakan kurang baik.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar (2018:429) Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan sosialnya. Ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan daerah pada tahun 2018 sebesar 9,48 persen dibanding tahun 2017. Perkembangan yang pesat membuat pendapatan dan belanja yang

dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar menjadi lebih bermacam-macam. Dalam mengatur keuangannya untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan Kabupaten Blitar melaksanakan pengelolaan keuangan agar hasil kinerja keuangan daerah yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dari uraian di atas alasan dilakukan penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan pemerintahan kabupaten Blitar walaupun transparansi mengenai laporan kinerja keuangan kabupaten Blitar telah dilakukan namun dengan adanya penelitian ini diharapkan transparansi menjadi lebih luas. Selain itu penulis juga tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kinerja Pemerintahan Kabupaten Blitar dalam mengelola keuangan daerahnya jika dibandingkan dengan kinerja pemerintah di daerah lain, dengan itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018 Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Blitar berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Blitar dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan pada PP No.12 Tahun 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

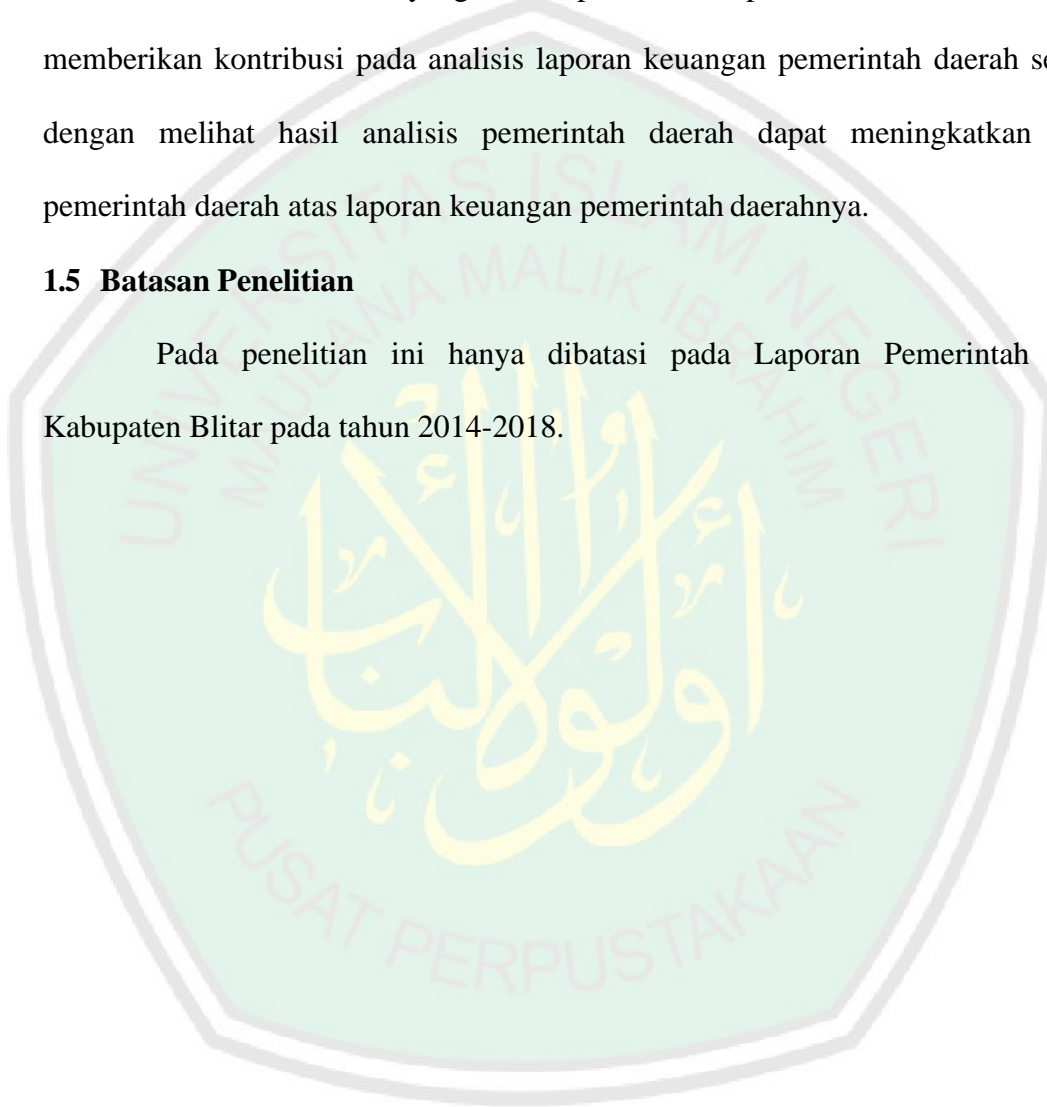
- a) Bagi peneliti, manfaat yang diharapkan adalah untuk menambah pengetahuan dan memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai keuangan daerah dengan menganalisis laporan keuangan daerah dan anggaran pemerintahan daerah. Serta sebagai bentuk mengaplikasikan ilmu yang diterima selama masa perkuliahan sehingga dapat digunakan untuk masa depan.
- b) Bagi instansi pemerintahan, manfaat yang diharapkan adalah agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
- c) Bagi pembaca, manfaat yang diharapkan adalah agar penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan dapat memberikan pemahaman mengenai kinerja keuangan Daerah Kabupaten Blitar dan dapat dijadikan penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pada analisis laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dengan melihat hasil analisis pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah atas laporan keuangan pemerintah daerahnya.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini hanya dibatasi pada Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2014-2018.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan saat ini ada baiknya jika menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai Kinerja Keuangan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Daerah adalah:

Penelitian sebelumnya oleh Ngangi (2018) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam rasio kemandirian dinilai masih kurang dan peran pemerintah masih lebih dominan. Berdasarkan rasio efisiensi PAD hasil kinerja dinilai efisien.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manueke (2020) dengan judul Analisa Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yaitu bahwa kinerja keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan rasio derajat desentralisasi masih sangat kurang karena masih tingginya peran pemerintah pusat. Dinilai dengan menggunakan rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah efektif.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Tanan dan Duri (2018) dengan judul penelitian Analisis Rasio untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian penelitian ini adalah bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jayapura dinilai masih terlalu rendah. Pemerintah daerah Kota Jayapura masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas kinerja dinilai sangat efektif, dan berdasarkan perhitungan rasio efisiensi kinerja dinilai sangat efisien.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harahap (2020) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kinerja keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah baik, namun hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi masih rendah dikarenakan ketergantungan dengan pemerintah pusat masih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan penerimaan PAD masih rendah dikarenakan tidak mencapai target yang ditentukan.

Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Susanto (2019) dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan perhitungan rasio efektivitas dinilai efektif yang berarti Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam merealisasikan PAD nya dinilai

sudah efektif, namun berdasarkan perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dinilai masih kurang efisien. Kemandirian daerah dinilai masih kurang dan pengelolaan keuangan daerah juga dinilai masih rendah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sartika (2019) dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut yaitu efisien dalam menekan jumlah belanja daerah dengan tidak melebihi pendapatan daerahnya dan pemerintah juga dinilai sudah efektif dalam mengelola PAD nya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mailangkay dkk (2020) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat dalam keuangan daerah Kota Bitung masih dominan. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dinilai sudah efektif. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dinilai sudah efisien.

Penelitian berikutnya yaitu dilakukan oleh Saputra dkk (2018) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember tahun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat dinilai sangat kurang, pemerintahan daerah masih sangat bergantung dengan pemerintahan

pusat, namun pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan pencapaian dari tahun sebelumnya. Dinilai dari perhitungan rasio efisiensi kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun dapat dikatakan sudah efisien.

Penelitian sebelumnya dapat disajikan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama	Judul	Tahun	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Anastasia Ivana Ngangi, Sri Murni, dan Victoria N. Untu	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	2018	Jurnal EMBA Vol.6 No.4 Hal.4103-4112	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sorong dapat dikatakan belum mandiri, dalam hal efisiensi, kinerja pemerintahannya sudah efisien. Dalam rasio derajat desentralisasi dinilai masih kurang. Dilihat dari rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dan dalam rasio belanja modal daerah setiap tahunnya kinerja mengalami kenaikan.

Tabel 2.1 (Lanjutan)

## Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	Nama	Judul	Tahun	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
2.	Billy Boy Rilmonth Manueke	Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2019	2020	Jurnal AKRAB JUARA Vol.5 No.2 Hal.132-146	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi dapat dikatakan masih kurang namun berdasarkan rasio efektivitas kinerja dapat dikatakan efektif.
3.	Christina Irwati Tanan dan Jimmi Ari Duri	Analisis Rasio untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura)	2018	Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol.6 No.1 Hal.91-101	Deskriptif Kuantitatif	Kemampuan keuangan masih dinilai terlalu rendah. Pemerintah daerah Kota Jayapura masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Berdasar rasio efektivitas kinerja dinilai sangat efektivitas. Berdasarkan rasio efisiensi kinerja dinilai sangat efisien.
4.	Heri Faisal Harahap	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	2020	Journal of Economics and Business Vol.4 No.1 Hal.34-38	Kuantitatif	Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk cukup dan rasio kemandiriannya dapat dikatakan masih rendah.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>NO.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Sumber Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
5.	Hery Susanto	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	2019	Jurnal Distribusi Vol.7 No.1 Hal.81-92	Kuantitatif	Kinerja keuangan daerah Kota Mataram dalam rasio efektivitas dapat dikatakan efektif. Berdasarkan rasio efiseinsi kinerja dapat dikatakan kuran efisien. Berdasarkan rasio kemandirian dapat dikatakan kinerja Daerah Kota Mataram masih rendah dan berdasarkan perhitungan aktivitas pengelolaan keuangan daerah dinilai masih rendah.
6.	Novira Sartika	Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti	2019	Jurnal Inovasi Bisnis Vol.7 Hal.147-153	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja Keuangan Pemeritah Daerah Kepulauan Meranti dinilai sudah efisien dan penerimaan PAD dapat dikatakan cukup baik karena sesuai dengan yang ditargetkan
7.	Priscilia Putri Utami Mailangkay, Sri Murni, dan Paulina Van Rate	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung	2020	Jurnal EMBA Vol.8 No.3 Hal.278-285	Kuantitatif	Kinerja keuangan Daerah Kota bitung dapat dikatakan masih membutuhkan peranan pemerintah pusat, namun berdasarkan rasio efektivitas dapat dikatakan sudah efektif dan berdasarkan rasio efisiensi dapat dikatakan efisien.

Tabel 2.1 (Lanjutan)

## Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	Nama	Judul	Tahun	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
8.	Sandy Candra Saputra, Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudiaatmajaya	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembranatahun	2018	Jurnal Manajemen Vol.4 No.2 Hal.136-145	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembranatahun dapat dinilai masih kurang dalam tingkat kemandiriannya namun pertumbuhan kinerja dapat dikatakan positif karena mencapai target yang diputuskan.

Sumber: Data Diolah, 2019

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Akuntansi Pemeritahan Daerah

Akuntansi Pemerintah Daerah adalah pengolahan, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 216:223).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- b. SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah). SAPD adalah serangkaian prosedur yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintah Daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi,

pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

- c. BAS (Bagan Akun Standar) untuk daerah. BAS untuk daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap. BAS untuk daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

Menurut Nordiawan (2007) *dalam* Rahmawati (2014:16), akuntansi pemerintahan memiliki tujuan yaitu:

- a. Tujuan pertanggungjawaban, dalam hal ini pemerintah memberikan informasi keuangan dengan lengkap, cermat dan dalam bentuk serta waktu yang tepat.
- b. Tujuan manajerial, yaitu memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja.
- c. Tujuan pengawasan, yaitu bahwa informasi yang diberikan mengenai akuntansi pemerintahan dapat memungkinkan untuk terselenggarakannya pemeriksaan oleh pengawas akuntansi pemerintahan.

### **2.2.2 Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam



rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam keuangan daerah terdapat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- a. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan persatuan perundang-

undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Pendapatan transfer yang terdiri dari:

a) Transfer pemerintah pusat meliputi:

- 1) Dana perimbangan
- 2) Dana otonomi khusus
- 3) Dana keistimewaan
- 4) Dana desa

b) Transfer antar daerah meliputi:

- 1) Pendapatan bagi hasil
- 2) Bantuan keuangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- b. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

- c. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

### **2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menyebutkan pengertian APBD yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh bagi hasil kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **2.2.3.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD)**

Struktur APBD terdiri dari:

- 1) Anggaran pendapatan, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain; dan bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
- 2) Anggaran belanja merupakan anggaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah
- 3) Pembiayaan, merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada periode anggaran yang terjadi maupun periode anggaran yang lainnya.

#### **2.2.3.2 Prosedur Pelaksanaan Anggaran**

Indra Bastian (2010:107), mengungkapkan mengenai prosedur pelaksanaan anggaran yaitu:

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah
- 2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- 3) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya
- 4) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah
- 5) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung atau akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa

termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah

- 6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama
- 7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- 8) Pengembalian tersebut harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

#### **2.2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Sujarweni (2015:89), fungsi dari adanya laporan keuangan dalam sektor publik adalah:

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan

Laporan keuangan memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik

3) Perencanaan dan informasi otorisasi

Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan untuk masa yang akan datang dan memberika informasi yang pendukung tentang otorisasi penggunaan data.

4) Kelangsungan organisasi

5) Hubungan masyarakat

Laporan keuangan memberika kesempatan bagi pemerintahan mengenai prestasi yang dicapai kepada pemakai laporan keuangan.

6) Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah.

Mahmudi (2016:162) mengungkapkan salah satu tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kinerja, dan menurut Sujarweni (2015:90), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai ekonomi, sosial dan politik dan sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta untuk memberikan informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi kinerja. Berdasarkan informasi dalam laporan keuangan Neraca, LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), Laporan Perubahan SAL, LAK, dan CaLK dapat dilakukan serangkaian analisis laporan keuangan.

### **2.2.5 Value for Money (VFM)**

Menurut Mahmudi (206:20), dalam akuntansi sektor publik terdapat *Value for Money* yaitu konsep pengelolaan keuangan yang menekankan pentingnya pengharagaan terhadap setiap rupiah uang publik sebagai bentuk cara memanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

#### **2.2.5.1 Ekonomi**

Ekonomi yaitu terkait dengan penggunaan anggaran atau kas yang menjadi input sekunder yang berupa tenaga kerja, bahan infrastruktur, dan barang modal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan untuk operasi organisasi.

#### **2.2.5.2 Efisiensi**

Efisiensi adalah hubungan antara output yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input.

### 2.2.5.3 Efektivitas

Efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang direncanakan (target) dengan hasil yang dicapai (realisasi). Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil.

### 2.2.6 Kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja yang hendak dicapai dalam pengelolaan keuangan terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan sasaran kinerja. Dalam hal ini untuk mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:158), pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.



### 2.2.6.1 Indikator Kinerja, Tolok Ukur Kinerja dan Sasaran Kinerja

#### a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran dan hasil. Indikator kinerja dalam hal ini digunakan sebagai indikator atau petunjuk keterangan pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berbentuk sebagai faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) (Sujarweni, 2015:116).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah dengan melihat nilai surplus dan defisit APBD. Selisih antara pendapatan APBD dan belanja APBD akan mengakibatkan surplus dan defisit APBD. Surplus dapat terjadi jika jumlah pendapatan APBD lebih besar daripada jumlah belanja APBD, sedangkan defisit dapat terjadi karena jumlah pendapatan APBD yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja APBD.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 84, surplus APBD dapat digunakan untuk:

- Membayar cicilan utang yang telah jatuh tempo
- Untuk penyertaan modal daerah

- Untuk dijadikan sebagai dana cadangan yang dapat digunakan untuk periode anggaran selanjutnya
- Pemberian pinjaman daerah, dan
- Untuk pengeluaran pembiayaan lainnya yang sesuai dengan undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dikatakan bahwa defisit APBD ditetapkan batas maksimal jumlah dapat dinilai sebagai defisit dan batas maksimal defisit dari pinjaman daerah setiap tahun anggaran. Dalam pasal 88 disebutkan defisit APBD harus ditutup dengan pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

#### **b. Tolok Ukur Kinerja**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Untuk menilai kinerja keuangan daerah, alat tolok ukur yang dapat digunakan adalah dengan menilai rasio keuangannya.

#### **c. Sasaran Kinerja**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sasaran kinerja adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

### 2.2.6.2 Tujuan Penilaian Kinerja Di Sektor Publik

Mahmudi (2007) dalam Nordiawan dan Hertianti (2010:158), mengungkapkan bahwa tujuan penilaian kinerja di sektor publik adalah:

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman
- 5) Memotivasi pegawai
- 6) Menciptakan akuntabilitas pegawai

Menurut Sujarweni (2015:108), terdapat beberapa elemen pokok dalam pengukuran kinerja yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari organisasi sektor publik yang berguna untuk mengukur kinerja
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- 3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi sektor publik
- 4) Evaluasi kinerja, yaitu seberapa pencapaian kinerja yang kemudian dijadikan dasar pengelola organisasi sektor publik untuk perbaikan periode setelahnya.

### 2.2.7 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Dengan data yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah, berikut teknik analisis yang digunakan:

### 2.2.7.1 Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2016:169), derajat desentralisasi didapatkan dengan menghitung perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyeleggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan dengan:

**Gambar 2.1**

#### Rumus Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Nilai derajat desentralisasi keuangan daerah dapat dikategorikan dalam tolok ukur sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Tabel Kategori derajat Desentralisasi Keuangan Daerah**

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0% -10%	Sangat kurang
10% -20%	Kurang
20% -30%	Sedang
30% -40%	Cukup
40% -50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depmendagri-Fisipol UGM, 2011

### 2.2.7.2 Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Mahmudi (2016:170), Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rumus dari rasio ini yaitu:

**Gambar 2.2**

#### Rumus Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer pusat+Provinsi})+\text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Nilai rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan dalam tolok ukur sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

#### Tabel Kategori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0% -10%	Sangat kurang
10% -20%	Kurang
20% -30%	Sedang
30% -40%	Cukup
40% -50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depmendagri-Fisipol UGM, 2011

### 2.2.7.3 Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016:170), Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan atau belanja dengan target penerimaan pendapatan atau belanja dengan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan dengan:

**Gambar 2.3**

**Rumus Rasio Efektivitas**

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan atau belanja}}{\text{Target pendapatan atau belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Rasio efektivitas dapat menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan atau belanja yang telah ditargetkan. Nilai efektivitas dapat dikategorikan dalam tolok ukur sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Tabel Kategori Rasio Efektivitas**

Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber : Mahmudi, 2016

#### 2.2.7.4 Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2016:171), Rasio efisiensi pendapatan atau belanja dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau belanja dengan realisasi penerimaan pendapatan atau belanja. Rasio efisiensi dirumuskan dengan:

**Gambar 2.4**

**Rumus Rasio Efisiensi**

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pendapatan atau belanja}}{\text{Realisasi pendapatan atau belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Dalam rasio efisiensi, semakin kecil nilai rasio yang didapatkan, maka semakin efisien kinerja pemerintah dalam pengalokasian pendapatan atau belanjanya. Nilai rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Tabel Kategori Rasio Efisiensi**

Sangat efisien	<5%
Efisien	5%-10%
Cukup efisien	11%-20%
Kurang efisien	21%-30%
Tidak efisien	>30%

Sumber : Mahmudi, 2016

### 2.2.8 Kinerja Menurut Islam

Islam mengajarkan umatnya agar selalu bekerja sebagai bentuk suatu ibadah kepada Allah SWT. Untuk menghasilkan kinerja yang halal dan diridhoi Allah ada baiknya dalam bekerja kita bekerja sesuai dengan etika islam. Bekerja dengan niat yang baik di jalan Allah akan mengantarkan pada hasil atau kinerja yang baik bagi dunia dan akhirat. Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 105 yaitu:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Arti:

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Menurut Hidayat (2006:136), etika profesi yang islami terdapat 10 hal yaitu:

- 1) Mencari rizki

Menurut Ahmad Muhammad Al-Hufy *dalam* Hidayat (2006:136), Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa islam adalah “aqidah, amanah, syariah dan amal, dan di dalam amalan meliputi ibadah, ketaatan dan kegiatan dalam mencari rizki. Oleh sebab itu Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk



mencari pekerjaan di bumi untuk mendapatkan rizki. Seperti dalam firman Allah dalam QS al-Jumu'ah, 62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Arti:

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ngatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat tersebut terdapat perintah agar kita mencari karunia Allah sebagai maksud agar kita mencari kerja di muka bumi.

## 2) Bekerja keras

Islam mengajarkan pada umatnya untuk mengetahui bahwa bekerja keras merupakan hal yang penting sebagaimana disampaikan dalam ayat al-Qur'an dan Hadits

- a) Katakanlah: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah diantara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.”
- b) Makanan yang terbaik adalah makanan yang dihasilkan oleh tangan sendiri sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

“Tidak ada orang memakan makanan yang lebih baik dari hasil pekerjaan tangannya sendiri (HR. Bukhori, 1930).

3) Ikhlas

Dalam ajaran Islam perbuatan seorang muslim mengandung nilai ibadah ketika perbuatan itu diniatkan untuk Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan, seperti dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: “Usaha yang paling baik adalah usaha orang yang bekerja dengan ikhlas.” (HR. Ahmad).

4) Jujur

Kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan kehidupan seperti dalam hadits. Rasulullah SAW menjelaskan: “Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang, apabila mereka berkata mereka tidak berdusta, apabila mereka diamanati tidak berkhianat, apabila mereka berjanji tidak menyalahi, apabila mereka membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-muji dagangannya, apabila mereka brutang tidak menunda-nunda, apabila mereka mempunyai piutang tidak mempersulit.” (HR. Ahmad).

5) Kerjasama

Dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Arti:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Dalam ayat tersebut dianjurkan untuk tolong-menolong dan bekerjasama. Bekerjasama akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan.

6) Keseimbangan

Islam merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Umat islam dianjurkan menjadi umat yang tengah, tidak berat sebelah.

Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 143 yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Arti:

“Demikianlah telah Kami jadikan kamu umat yang tengah (adil).”

7) Mellihat ke depan

Agama Islam menhajarkan pada umatnya agar melihat ke masa depan.

Sabda Rasulullah SAW: “Jika kiamat datang, sedang digenggaman seseorang diantaramu terdapat bibit pohon kurma, apabila masih sempat, maka tanamlah pohon kurma itu.” (HR. Bukhari).

8) Larangan meminta-minta

Di dalam hadits Rasulullah bersabda: “Tangan yang atas lebih baik dari tangan yang bawah” (HR. Bukhari), dalam hal tangan atas adalah orang yang memberikan dan tangan bawah adalah orang yang meminta-minta. Islam dalam hal ini mengajarkan bahwa agar umatnya bekerja keras dan amat mengecam peminta-minta.

9) Larangan memonopoli

Memonopoli adalah bentuk menumpuk barang untuk dengan jumlah tertentu untuk seseorang sehingga seseorang itu dapat mengendalikan harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Rasulullah sangat melarangnya, seperti dalam hadits yang berbunyi: “Barang siapa yang menumpuk barang-barang atau makanan atau kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya.” (HR. Ahmad).

10) Mendahulukan kualitas dan kerapihan

Dalam agama Islam, kerapihan dalam melakukan bisnis sangat dianjurkan sehingga pembeli menjadi ikhlas dalam melakukan transaksi. Dalam hadits dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seorang diantara kamu apabila mnegerjakan suatu pekerjaan dirapikannya.” (HR. Ahmad).

### 2.3 Kerangka Konspetual

Penelitian ini mengambil dasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

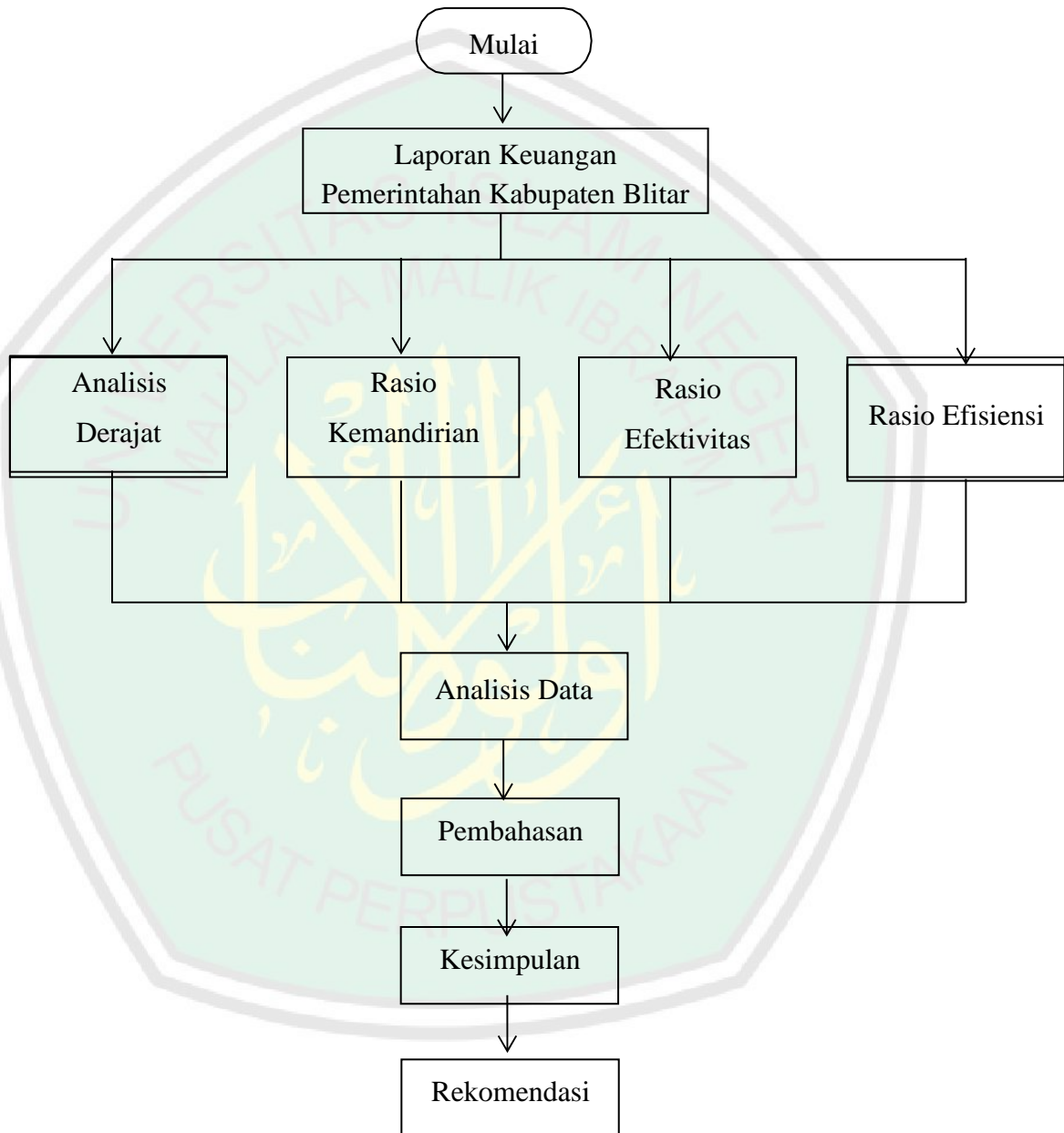
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta literatur beberapa buku mengenai Akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan daerah.

Berdasarkan sumber tersebut, penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu:

1. Derajat Desentralisasi
2. Rasio kemandirian daerah
3. Rasio efektivitas
4. Rasio efisiensi
5. Analisis dengan menyesuaikan hasil kinerja keuangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka berfikir yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Data Diolah, 2019

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan metode yang benar yang sesuai dengan objek yang diteliti sehingga hasil penelitian bisa menjadi pemecah rumusan masalah. Selain metode yang digunakan, data yang diambil untuk penelitian juga menentukan keberhasilan penelitian. Data yang digunakan untuk penelitian merupakan data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dan metode yang digunakan adalah:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:15), metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sering digunakan untuk melihat fenomena sosial yang bersifat kasus (Indrawan dan Yaniawati, 2014:67). Dalam penelitian ini kasus yang diamati adalah kinerja keuangan Kabupaten Blitar dengan menganalisis laporan keuangan daerah Kabupaten Blitar.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Jl. Sudanco Supriadi No.17, Kota Blitar, Jawa Timur.

### 3.3 Subyek Penelitian

Menurut Moloeng *dalam* Rahmawati (2014:39), subjek penelitian merupakan informan, yaitu orang yang memahami latar penelitian dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif, data didapatkan dari wawancara dan data yang diterima selama penelitian kemudian diolah dalam bentuk deskriptif. Data yang diambil untuk penelitian yaitu:

- 1) Data primer

Data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan juru kunci yang menjadi perwakilan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber atau juru kunci yang mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Blitar.

- 2) Data sekunder

Data diperoleh dari dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang didapatkan selama penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan



pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang didapat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2014-2018.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:308), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2017:317), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada narasumber yang memahami tentang kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar

#### **2. Metode Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2017:329), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang didapat berupa tulisan atau gambar. Dokumentasi yang didapat yaitu berupa data diunakan sebagai bahan analisis yang didapat dari Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menyampaikan data dengan mendeskripsikan hasil yang didapat dari pengolahan data yang berkaitan dengan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun 2014-2018. Dalam penelitian ini analisis data yang akan dilaksanakan terdapat beberapa alur yaitu:

- a. Melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Kabupaten Blitar dengan melakukan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan yaitu wawancara dan dokumentasi berupa data yang tersedia yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan Laporan keuangan pemerintah Daerah dari perwakilan pegawai di Badan Pendapatan Kabupaten Blitar.
- b. Mengolah data dengan analisis pengukuran kinerja yang telah ditentukan.

Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu:

- Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

- Rasio Efektivitas Pendapatan dan Belanja

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan atau Belanja}}{\text{Target Pendapatan atau Belanja}} \times 100\%$$

- Rasio Efisiensi Pendapatan dan Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pendapatan atau Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan atau Belanja}} \times 100\%$$

- c. Membuat kesimpulan yang diambil dari data hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan melihat hasil analisis data laporan keuangan daerah Kabupaten Blitar yang disajikan dengan mendeskripsikan hasil analisis.
- d. Menggunakan hasil penelitian sebagai bahan untuk digunakan bagi beberapa pihak sebagaimana yang diharapkan dalam manfaat penelitian contohnya sebagai pembelajaran bagi penelitian, informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Blitar dan informasi bagi instansi keuangan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN**

#### **4.1 Paparan Data**

##### **4.1.1 Latar Belakang BPKAD Kabupaten Blitar**

BPKAD Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kedudukan BPKAD adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mengakut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan, dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendaharaa Umum Daerah. BPKAD Kabupaten Blitar berlokasi di Jl. Sudanco Supriyadi No.17, Kota Blitar.

##### **4.1.2 Visi & Misi BPKAD Kabupaten Blitar**

Visi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar”.

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- b) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas, dan berkeadilan,
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar**

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, membawahi :
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 4) Sub Bagian Keuangan;
- 5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 6) Bidang Anggaran, membawahi:
  - 7) Sub Bidang Anggaran I;
  - 8) Sub Bidang Anggaran II;
  - 9) Sub Bidang Anggaran III.
- 10) Bidang Akuntansi, membawahi:
  - 11) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
  - 12) Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  - 13) Sub Bidang Evaluasi.
- 14) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
  - 15) Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
  - 16) Sub Bidang Pengelolaan Kas;
  - 17) Sub Bidang Pengelolaan Gaji.

- 18) Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
- 19) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah;
- 20) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
- 21) Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah.
- 22) UPTB;
- 23) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  - b. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  - c. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - d. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



#### **4.1.4.1 Kepala Badan**

Dalam tugasnya, Kepala Badan BPKAD Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang keuangan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- c. memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan lain-lain

#### **4.1.4.2 Sekretariat**

Sekretaris, yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan program badan, organisasi dan tata laksana badan.

#### **4.1.4.3 Sub Bagian Penyusunan Program**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :



- a. menyusun program dan perencanaan kegiatan badan;
- b. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **4.1.4.4 Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- b. menganalisis kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- c. menyusun pembayaran gaji pegawai;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **4.1.4.5 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi persuratan, kerasipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga;

- b. melaksanakan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- c. merencanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **4.1.4.6 Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. merumuskan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- c. mengkoordinasikan pengendalian penyusunan anggaran; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **4.1.4.7 Bidang Anggaran I**

Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada dinas daerah; dan lain-lain

#### **4.1.4.8 Bidang Anggaran II**

Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah; dan lain-lain

#### **4.1.4.9 Bidang Anggarn III**

Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat dan Kecamatan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada Inspektorat dan Kecamatan; dan lain-lain.

#### **4.1.4.10 Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang evaluasi, pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. mengkoordinasikan penyajian informasi laporan keuangan daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **4.1.4.11 Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Pasal 15**

Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang pembukuan akuntansi penerimaan dan pengeluaran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan;
- b. melaksanakan akuntansi penerimaan pembiayaan;

- c. melaksanakan akuntansi pengeluaran belanja;
- d. melaksanakan akuntansi pengeluaran pembiayaan; dan lain-lain

#### **4.1.4.12 Sub Bidang Akuntansi Pelaporan**

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan akuntansi piutang;
- b. melaksanakan akuntansi persediaan;
- c. melaksanakan akuntansi investasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala; dan lain-lain

#### **4.1.4.13 Sub Bidang Evaluasi**

Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dibidang evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun pengumpulan, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ Fungsional SKPD;
- b. membuat konsep kerjasama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan;
- c. menyusun kebijakan akuntansi keuangan daerah dan system akuntansi dan kebijakan lain terkait dengan pelaksanaan Akuntansi; dan lain-lain.

#### **4.1.4.14 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan kas dan perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan gaji PNS;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan peraturan bupati tentang pelaksanaan APBD; dan lain-lain.

#### **4.1.4.15 Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan**

Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pelayanan perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten;
- c. melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara SKPD se-Kabupaten; dan lain-lain

#### **4.1.4.16 Sub Bidang Pengelolaan Kas**

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan kas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten;
- b. melaksanakan Pelayanan proses pencairan dana SKPD atau Pihak Ketiga;
- c. melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan dan pengeluaran daerah kedalam buku kas, koreksi dan validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan bulanan; dan lain-lain

#### **4.1.4.17 Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Aset Daerah;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan barang Aset Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Aset Daerah; dan lain-lain

#### **4.1.4.18 Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah**

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah;
- c. penyusunan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang mili;

#### **4.1.4.19 Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Pasal 24**

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pemanfaatan, penggunausahaan, pemindahtanganan, dan pengamanan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;
- c. melaksanakan pemanfaatan Aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;



#### **4.1.4.20 Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah**

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pengendalian dan penghapusan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penelitian usulan pejabat fungsional umum yang mengurus Aset Daerah dari pengguna barang;
- b. merencanakan, mengatur dan mengusulkan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
- c. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

#### **4.1.4.21 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2014 sampai 2018. Dalam Laporan Keuangan Daerah

telah didapat data-data berupa angka yang digunakan sebagai pengukur tingkat kinerja keuangan Kabupaten Blitar.

Cara yang dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan adalah menggunakan rumus derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi kemudian menyajikan data yang telah diolah tersebut dalam bentuk tabel dan penjelasan secara narasi.

#### 4.2.1 Kinerja Keuangan Daerah dengan Analisis Derajat Desentralisasi

Hasil perhitungan analisis Derajat Desentralisasi Daerah Kabupaten Blitar tahun 2014-2018 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Perhitungan Derajat Desentralisasi Kabupaten Blitar**

**Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Derajat Desentralisasi</b>	<b>Klasifikasi Tingkat Derajat Desentralisasi</b>
<b>2014</b>	188.827.430.090	1.927.712.093.449	9.80%	Sangat kurang
<b>2015</b>	216.648.256.569	2.121.599.164.366	10.21%	Kurang
<b>2016</b>	224.106.765.168	2.240.251.740.265	10.00%	Kurang
<b>2017</b>	322.878.943.149	2.307.812.881.171	13.99%	Kurang
<b>2018</b>	252.435.245.801	2.352.130.150.237	10.73%	Kurang

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Tabel 4.2

Tabel Kategori derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0% -10%	Sangat kurang
10% -20%	Kurang
20% -30%	Sedang
30% -40%	Cukup
40% -50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depmendagri-Fisipol UGM, 2011

Berdasarkan data yang telah diolah, pada tahun 2014 hasil derajat desentralisasi menunjukkan angka 9.80% sehingga dikategorikan tingkat derajat desentralisasinya masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat PAD Kabupaten Blitar dengan pendapatan total yang didapat Kabupaten Blitar masih sangat kurang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pajak yang kurang karena masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam membayar pajak.

Pada tahun 2015 tingkat derajat desentralisasi meningkat menjadi 10.21%, namun masih dikategorikan tingkat derajat desentralisasinya masih kurang. PAD dan pendapatan total pada tahun 2015 meningkat. Hal ini menunjukkan pendapatan pajak meningkat yang berarti masyarakat Kabupaten Blitar mulai banyak yang berpartisipasi dalam membayar pajak.

Pada tahun 2016, hasil derajat desentralisasi menunjukkan persentase 10.00% yang dikategorikan derajat desentralisasinya kurang. Dalam hal ini, dibandingkan tahun sebelumnya tingkat derajat desentralisasinya berkurang 0.21%. Hal ini

dikarenakan total PAD yang masih kurang dibandingkan dengan total pendapatan seluruhnya. Namun dibandingkan pada tahun 2015 jumlah PAD meningkat sebanyak Rp 7.458.508.599.

Pada tahun 2017 hasil derajat desentralisasi menunjukkan angka 13.99%. tingkat derajat desentralisasi ini merupakan tingkat derajat desentralisasi yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 PAD yang didapat oleh Kabupaten Blitar sangat meningkat dibandingkan pada tahun 2016. Perbedaan PAD pada tahun 2017 dan 2016 meningkat sebanyak Rp 98.772.177.981 dikarenakan peran masyarakat dalam ikut serta membayar pajak semakin banyak.

Pada tahun 2018 hasil derajat desentralisasi adalah 10.73%. Jumlah ini menurun dibandingkan pada hasil derajat desentralisasi ada tahun 2017. Pada laporan keuangan Daerah Kabupaten Blitar jumlah pendapatan pajak daerah yang didapat pada tahun 2018 meningkat dibanding pada tahun 2017, namun jumlah total PAD pada tahun 2018 menurun dikarenakan jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang lebih sedikit dibandingkan jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tahun 2017.

Berdasarkan penemuan penelitian, tingkat derajat desentralisasi selama lima tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar masih kurang dalam kemampuan desentralisasinya. Kabupaten Blitar masih membutuhkan pendapatan dari pemerintahan pusat untuk melakukan otonomi daerahnya. Rata-rata hasil derajat desentralisasi adalah 10.95% yang berarti tingkat desentralisasi Kabupaten Blitar

masih kurang. Namun peran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

#### 4.2.2 Kinerja Keuangan Daerah dengan Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Hasil perhitungan analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Blitar tahun 2014-2018 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**

#### Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2014-2018

Ta- hun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pusat dan Pinjaman		Rasio Ke- mandi- rian Daerah	Klasifikasi Rasio Kemandi-rian Daerah
		Total Pendapatan Transfer Pusat dan Provinsi	Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
2014	188.827.430.090	1,625,297,146,359	113,587,517,000	10.86%	Kurang
2015	216.648.256.569	1,894,818,020,797	10,121,887,000	11.37%	Kurang
2016	224.106.765.168	1,997,501,233,276	18,643,741,720	11.12%	Kurang
2017	322.878.943.149	1,984,933,938,022	0	16.27%	Kurang
2018	252.435.245.801	2,014,497,020,105	85,179,884,330	12.02%	Kurang

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

**Tabel 4.4**

#### Tabel Kategori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0% -10%	Sangat kurang
10% -20%	Kurang
20% -30%	Sedang
30% -40%	Cukup
40% -50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depmendagri-Fisipol UGM, 2011

Berdasarkan data yang telah diolah, pada tahun 2014 hasil Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan angka persentase sebesar 10.86%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Blitar masih kurang. PAD yang didapat oleh Kabupaten Blitar masih berbanding jauh dibanding pendapatan yang didapat dari pemerintah pusat dan provinsi juga dari pendapatan lain-lain yang sah.

Pada tahun 2015 hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Blitar adalah 11.37%. Dalam hal ini rasio kemandirian meningkat 0.51%, namun rasio kemandiriannya dikategorikan masih kurang. Pada tahun 2016 hasil rasio kemandirian Daerah Kabupaten Blitar adalah 11.12%. Pada tahun ini hasil rasio kemandirian daerah menurun 0.26%. Pada tahun 2016, bantuan pusat dan pinjaman yang didapat oleh Kabupaten Blitar bertambah sebanyak Rp 111.205.067.199, walaupun PAD yang diperoleh Kabupaten Blitar meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, rasio kemandirian Kabupaten Blitar pada tahun 2016 masih kurang.

Pada tahun 2017 tingkat rasio kemandirian yang didapat adalah 16.27%. Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mendapat pendapat lain-lain yang sah dari pemerintah pusat ataupun provinsi, sehingga kemampuan daerah dalam kemandiriannya meningkat sebanyak 5.15% dibandingkan pada tahun 2016. Pada tahun ini PAD Kabupaten Blitar juga meningkat. Pada tahun 2018 hasil rasio kemandirian daerah menunjukkan 12.02%, hasil ini menurun sebanyak 4,24% dibandingat hasil rasiomkemandirian pada tahun 2017. Pada tahun 2018, bantuan pusat dan pinjaman yang diperoleh Kabupaten Blitar adalah sebanyak Rp

2.099.676.904.435, meningkat sebanyak Rp 114.742.966.413 dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemandirian Kabupaten Blitar selama tahun 2014-2018 dikatakan masih kurang. Pemerintah pusat masih sangat berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi Daerah Kabupaten Blitar. Dilihat dari jumlah PAD dan bantuan dari pusat dari tahun ke tahun Kabupaten Blitar selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan tingkat bantuan dari pusat berperan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam menjalankan otonomi daerahnya, juga partisipasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam membayar pajak.

#### 4.2.3 Kinerja Keuangan Daerah dengan Analisis Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan analisis Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Blitar tahun 2014-2018 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**

#### **Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Blitar**

**Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>Pagu Anggaran PAD</b>	<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
<b>2014</b>	188.827.430.090	167.268.618.919	112.89%	Sangat efektif
<b>2015</b>	216.648.256.569	194.741.380.463	111.25%	Sangat efektif
<b>2016</b>	224.106.765.168	214.186.478.670	104.63%	Sangat efektif
<b>2017</b>	322.878.943.149	314.340.556.529	102.72%	Sangat efektif
<b>2018</b>	252.453.245.801	233.971.892.347	107.90%	Sangat efektif

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Tabel 4.6

Tabel Kategori Rasio Efektivitas

Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber : Mahmudi, 2016

Berdasarkan data yang telah diolah, pada tahun 2014 menunjukkan rasio efektivitas adalah 112.89%, dalam hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam merealisasikan PAD sangat efektif. Selisih antara realisasi dengan target yang direncanakan adalah Rp 21.558.245.801, dilihat dari target realisasi yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar adalah Rp 167.268.618.919, sedangkan realisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar adalah Rp 188.827.430.090.

Pada tahun 2015 hasil rasio efektivitas yang didapat adalah 111.25% yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam merealisasikan PAD dibandingkan target yang ditetapkan adalah sangat efektif karena persentase rasio kemandirian daerah yang didapat lebih dari seratus persen. Namun dibandingkan pada tahun 2014 hasil rasio efektivitas menunjukkan penurunan sebesar 1.64%. Pada tahun 2016, hasil rasio efektivitas adalah 104.63% yang berarti tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah sangat efektif karena angka persentase yang didapatkan lebih dari seratus persen. Pada tahun 2017, hasil rasio efektivitas yang diperoleh adalah 102.72% yang menunjukkan bahwa realisasi PAD



yang dilaksanakan dibandingkan target PAD yang ditetapkan adalah sangat efektif. Namun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya persentase rasio kemandirian yang didapat pada tahun 2017 semakin menurun. Pada tahun 2018, hasil rasio efektivitas yang didapat adalah 107.90% yang berarti tingkat realisasi PAD yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah sangat efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil rasio efektivitas yang didapat pada tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan yang konstan dan baru mengalami peningkatan embali pada tahun 2018 sebesar 5.18% dibandingkan tahun 2017, namun tingkat rasio efektivitas selama lima tahun menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Blitar stabil dan selalu sangat efektif dikarenakan pencapaiannya yang selalu lebih dari seratus persen.

#### **4.2.4 Kinerja Keuangan Daerah dengan Analisis Rasio Efisiensi**

Dalam menentukan jumlah biaya pemungutan PAD, terdapat peraturan yang mengatur berapa nominal biaya pemungutan PAD untuk menentukan tingkat rasio efisiensi Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan pada Pasal 5 besarnya insentif ditetapkan untuk provinsi sebesar 3% dan 5% untuk kabupaten atau kota. Hasil perhitungan analisis Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Blitar tahun 2014-2018 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7

## Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Blitar

Tahun 2014-2018

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (5%) Pagu Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
2014	8,363,430,945	188.827.430.090	4.43%	Sangat Efisien
2015	9,737,069,023	216.648.256.569	4.49%	Sangat Efisien
2016	10,709,323,934	224.106.765.168	4.78%	Sangat Efisien
2017	15,717,027,826	322.878.943.149	4.87%	Sangat Efisien
2018	11,698,594,617	252.453.245.801	4.63%	Sangat Efisien

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Tabel 4.8

## Tabel Kategori Rasio Efisiensi

Sangat efisien	<5%
Efisien	5%-10%
Cukup efisien	11%-20%
Kurang efisien	21%-30%
Tidak efisien	>30%

Sumber : Mahmudi, 2016

Berdasarkan data yang telah diolah, pada tahun 2014, hasil rasio efisiensi yang didapat adalah 4.43%, hal ini berarti tingkat efisiensi yangn didapat adalah sangat efisien karena rasio yang didapatkan kurang dari 5%. Semakin sedikit hasil rasio efisiensi yang didapat, makan semakin efisien kinerja kuangnya. Pada tahun 2015 hasil rasio efiseinsi adalah 4.49% yang berarti tingkat efisiensnya adalah sangat efisien. Tingkat rasio efisiensi pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan sebesar 0.07% dibandingkat pada tahun 2014.

Pada tahun 2016 hasil rasio efisiensi adalah 4.78% yang berarti sangat efisien karena hasil rasio efisiensi menunjukkan persentase kurang dari 5%. Pada tahun 2017 hasil rasio efisiensi adalah sebesar 4.87%. dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sangat efisien dalam kinerja keuangannya. Hasil rasio efisiensi juga meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 hasil rasio efisiensi adalah 4.63% yang berarti kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Blitar adalah sangat efisien karena hasil menunjukkan angka kurang dari 5%.

Berdasarkan penelitian yang didapat, hasil rasio efisiensi yang didapat pada tahun 2014 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2018, hasil rasio efisiensi menurun sebesar 0.23% dibandingkan hasil rasio efisiensi pada tahun 2017.

#### **4.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019**

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 kinerja yang hendak dicapai dapat ditentukan dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan sasaran kinerja. Berbagai faktor tersebut dapat ditemukan dalam informasi yang tersedia dalam RKA SKPD.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019, indikator yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya adalah analisis surplus atau defisit APBD. Untuk menganalisis dengan menggunakan alat ini adalah dengan selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah. Apabila hasil

menunjukkan nilai negatif maka terjadi defisit APBD. Sedangkan jika hasil menunjukkan angka positif maka terjadi surplus APBD.

**Tabel 4.9**

**Tabel Analisis Surplus APBD dan Defisit APBD**

Tahun	Pendapatan APBD	Belanja dan Trasfer APBD	Selisih	Surplus/ Defisit
2014	1.927.712.093.449	1.803.200.913.471	124.511.179.978	Surplus
2015	2.121.588.164.366	2.072.628.708.227	48.959.456.139	Surplus
2016	2.240.251.740.265	2.368.672.195.620	(128.240.455.354)	Defisit
2017	2.307.812.881.171	2.350.585.581.535	(42.772.700.364)	Defisit
2018	2.352.130.150.237	2.209.343.992.301	142.786.157.935	Surplus

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Pada tabel diatas ditunjukkan hasil analisis surplus dan defisit APBD. Pada tahun 2014 selisih pendapatan dan belanja APBD mengalami surplus yaitu jumlah pendapatan APBD lebih besar dibandingkan dengan belanja APBD. Pada tahun 2015 jumlah pendapatan APBD memiliki nilai yang lebih banyak dibandingkan dengan belanja APBD yang berarti mengalami surplus. Tahun 2016 selisih pendapatan dan belanja APBD mengalami defisit dimana pengeluaran untuk belanja pada tahun 2016 memiliki nilai yang lebih banyak dibandingkan pendapatan APBD yang masuk. Hal ini juga berlaku untuk tahun 2017 dimana keuangan mangalami defisit karena jumlah nelanja APBD yang lebih besar dibanding pendapatata APBD. Pada tahun 2018 selisih pendapatan dan belanja APBD mengalami surplus dengan selisih sejumlah Rp 142.786.157.935.

### 4.3 Pembahasan

Setelah mendapatkan hasil penelitian, pembahasan dapat dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan latar belakang dilakukannya penelitian. Dalam hal ini, hasil penelitian yang berupa hasil kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Blitar merupakan bentuk transparansi bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah.

Hasil penelitian mengenai derajat desentralisasi didapatkan bahwa kinerja pada tahun 2014 masih dinilai sangat kurang dan pada tahun-tahun berikutnya kinerja dinilai kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Blitar dalam hal keuangan masih membutuhkan pendapatan selain PAD seperti transfer dari pusat atau pendapatan lain selain PAD yang sah. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di daerah Kabupaten Sorong Selatan yang dilakukan oleh Ngangi dkk (2018:4108) hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi dari tahun 2012-2015 rata-rata sebesar 2,85% yang berarti sangat kurang sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal derajat desentralisasi dapat dikatakan masih lebih baik.

Pembahasan selanjutnya mengenai Rasio Kemandirian daerah yaitu kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki rasio kemandirian yang kurang karena hasil perhitungan berkisar di antara 10%-20%. Dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura seperti yang telah dilakukan dalam penelitian oleh Tanan dan Duri (2018:98), kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dikatakan sejajar dengan kinerja Pemerintah Kota Jayapura pada tahun 2011-2017 karena Rasio Kemandirian

daerah menunjukkan angka dengan kisaran 10%-20% yang berarti kinerjanya masih kurang, sama seperti yang terjadi pada kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dengan rasio kemandiriannya berada pada kisaran 10%-20%. Dalam hal ini Kota Jayapura dan Kabupaten Blitar masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat dalam hal pendapatannya. Transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih lebih dominan dibandingkan pendapatan asli dari daerah masing-masing.

Hasil perhitungan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi dengan target anggaran yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pemerintah efektif dalam merealisasikan anggaran yang telah ditargetkan. Perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sangat efektif dalam melakukan realisasi anggarannya. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014-2017 oleh Manueke (2020:142) dengan hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2014-2015 yaitu 94,86% dan 92,97% yang berarti efektif dan pada tahun 2016-2017 dengan hasil perhitungan rasio efektivitas 100,16% dan 104,78% yang dapat dikatakan sangat efektif, kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dikatakan lebih baik karena hasil perhitungan rasio efektivitas berada di atas 100% seluruhnya.

Pada perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dinilai sangat efisien. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang dilakukan oleh Tanan dan Duri (2018:4108), rasio efisiensi PAD pada tahun 2012 dapat dinilai cukup efisien karena berada pada kisaran 11% hingga 20%. Pada tahun 2013 kinerja dapat

dinilai efisien karena nilai menunjukkan angka 10%. Pada tahun 2014 hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan angka 4,9% yang berarti sangat efisien. Pada tahun 2015 hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan angka 12,4% yang berarti kinerjanya cukup efisien, kemudian pada tahun 2016 hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan angka 5,51% yang berarti kinerjanya efisien. Jika dibandingkan dengan kabupaten Blitar maka kinerja kabupaten Blitar dinilai lebih baik karena hasil perhitungan rasio efisiensi dari tahun 2014- 2018 seluruhnya sangat efisien. Dalam hal ini berarti pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemungutan biaya PAD sudah sangat efisien jika dibandingkan dengan hasil realisasi anggaran.

Pada perhitungan surplus dan defisit kabupaten Blitar dapat dihasil surplus di beberapa tahun dan defisit di beberapa tahun lainnya. Dibandingkan dengan hasil perhitungan surplus defisit di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan mendapatkan surplus dari tahun 2012 hingga 2014 namun pada tahun 2015 mendapatkan defisit karena belanja APBD lebih besar daripada pendapatan APBD Kemudian pada tahun 2016 kinerja keuangan mengalami surplus kembali. Dalam hal ini Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil kinerja yang sama yaitu terdapat surplus dan defisit di beberapa tahun.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Blitar pada tahun 2014 hasil derajat desentralisasi kurang dari sepuluh persen yang berarti masih sangat kurang, sedangkan pada tahun 2015-2018 hasil derajat desentralisasi berada diantara sepuluh persen hingga dua puluh persen yang berarti tingkat derajat desentralisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dinilai masih kurang karena pendapatan lainnya selain PAD lebih dominan dibandingkan PAD yang diperoleh.

Kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dilihat dari rasio kemandirian pada tahun 2014-2018 menunjukkan angka kisaran antara sepuluh persen hingga dua puluh persen. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Blitar dinilai masih kurang. Peran pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman lainnya yang diperoleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar lebih dominan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Kurangnya peran masyarakat dalam pembayaran pajak juga mempengaruhi tingkat kemandirian pemerintah.

Kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2014-2018 adalah sangat efektif. Hasil rasio efektivitas



Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dari tahun 2014-2018 menunjukkan angka lebih dari seratus persen. Dalam hal ini realisasi PAD yang dilaksanakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar lebih besar dibandingkan target yang telah direncanakan oleh Pemerintah.

Kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2014-2018 adalah sangat efisien. Hasil rasio efisiensi yang didapat menunjukkan persentase kurang dari lima persen yang berarti kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar adalah sangat efisien.

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan yang dilihat dari surplus atau defisit APBD, kinerja keuangan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2014 dan 2015 mengalami surplus dimana jumlah pendapatan APBD lebih besar daripada jumlah Belanja APBD. Pada tahun 2016 dan 2017, kinerja keuangan Daerah Kabupaten Blitar mengalami defisit karena jumlah pendapatan APBD yang lebih kecil dibandingkan belanja APBD yang didapatkan. Pada tahun 2018, kinerja keuangan Daerah Kabupaten Blitar mengalami surplus kembali.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar serta kesimpulan yang telah dibuat di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan kinerja keuangannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar yaitu untuk meningkatkan jumlah PAD dengan mengajak masyarakat untuk membayar pajak sebagai bentuk

partisipasi pembangunan daerah agar lebih maju dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada sehingga dapat meminimalkan sumber dana dari pemerintah pusat dan pinjaman pemerintah. Dengan demikian diharapkan kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dapat meningkat dan masyarakat Kabupaten Blitar semakin makmur.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya jika menggunakan penelitian ni sebagai referensi agar memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini pada penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Halim, Abdul., Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2008. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, Heri Faisal. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*. *Journal of Economics and Business* Vol. 4 No. 1 hal. 34-38.

Hidayat, Iman S. 2004. *Etos Kerja Sesuai dengan Profesi Islam*. *Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. XXII No. 1 hal 130-142. Bandung: Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung.

H.R. Ahmad

H.R. Bukhari

Indrawan, Rully., Yaniawati, Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

Manueke, Billy Boy Rilmonth. 2020. *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2019*. *Jurnal AKRAB JUARA* Vol. 5 No. 2 hal. 132-146.

Nordiawan, Dedi., Hertianti, Ayunigntyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

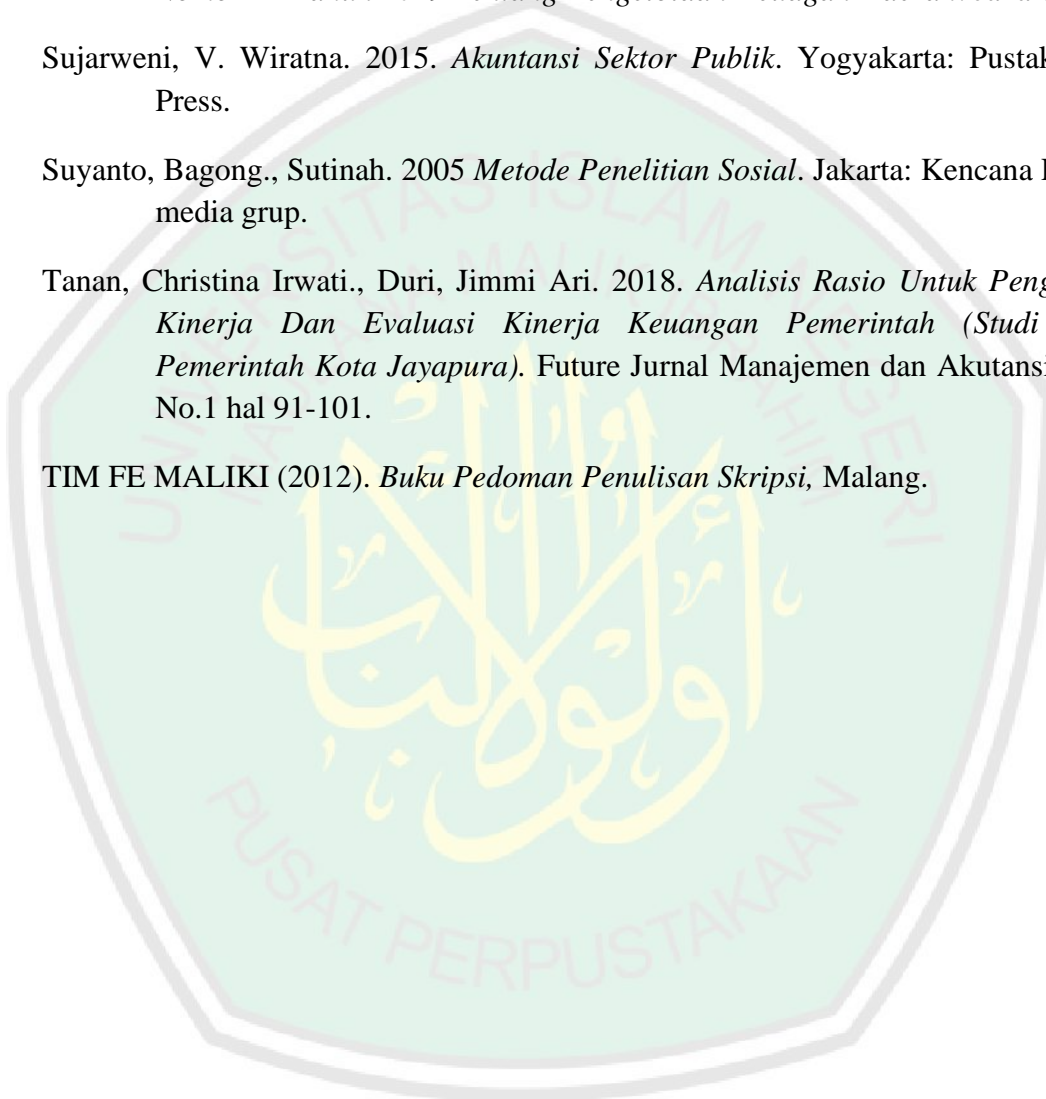
Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suyanto, Bagong., Sutinah. 2005 *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada media grup.

Tanan, Christina Irwati., Duri, Jimmi Ari. 2018. *Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura)*. Future Jurnal Manajemen dan Akutansi Vol. 6 No.1 hal 91-101.

TIM FE MALIKI (2012). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.



## LAMPIRAN 1

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Fairuz Humaida  
NIM/Jurusan : 15520129/Akuntansi  
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFrA  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018 Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)

No.	Tanggal	Keterangan	TTD
1	19 Maret 2019	Konsultasi Judul	1.
2	12 Juni 2019	Konsultasi Bab I	2.
3	14 Agustus 2019	Konsultasi Bab II & III	3.
4	26 November 2019	Revisi Bab I, II, dan III	4.
5	04 Desember 2019	ACC Proposal	5.
6	03 Februari 2020	Seminar Proposal	6.
7	11 Februari 2020	ACC Proposal	7.
8	14 Maret 2020	Perubahan Judul	8.
9	20 Oktober 2020	Konsultasi Bab IV dan V	9.
10	27 Oktober 2020	Revisi Bab IV dan V	10.
11	19 November 2020	ACC Keseluruhan	11.

Malang, 19 November 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 1972032200801 2 005

## LAMPIRAN 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email [info@u-malang.ac.id](mailto:info@u-malang.ac.id)

Nomor : B-2456/FEK 1/PP.00 9/02/2020 27 Februari 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
**Pimpinan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar**  
Jl. Sudanco Supriadi No. 17, Kota Blitar  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Fairuz Humaida  
NIM : 15520129  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Contact Person : 08113083750  
Alamat e-mail : [fairuz\\_humaida@yahoo.com](mailto:fairuz_humaida@yahoo.com)  
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014-2018 (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Dekan Bidang Akademik,

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik.
  4. Arsip.

28/2/2020  
*A. Hani*

# LAMPIRAN 3

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	Anggaran 2015	Realisasi 2015	(%)	Realisasi 2014
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	50.366.915.000,00	55.117.136.562,30	109,43	47.934.618.068,60
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	20.041.780.698,00	20.935.300.666,32	104,46	23.965.271.566,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3	1.952.683.601,00	1.861.674.544,70	95,34	2.012.683.600,95
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4	122.380.001.164,66	138.734.144.796,67	113,36	114.914.856.855,34
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		194.741.380.463,66	216.648.256.569,99	111,25	188.827.430.090,89
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.a	32.812.302.000,00	23.689.124.102,00	72,20	27.764.546.810,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1.b	45.514.124.758,00	38.802.898.258,00	95,10	34.676.514.522,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1.c	1.037.911.125.000,00	1.037.911.125.000,00	100,00	1.027.251.687.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1.d	145.856.470.000,00	142.410.070.000,00	97,64	71.417.130.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.262.094.021.758,00	1.242.813.217.360,00	98,84	1.161.109.878.332,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.b.2				
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2.1	423.601.298.000,00	425.305.705.000,00	100,40	341.876.688.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)		423.601.298.000,00	425.305.705.000,00	100,40	341.876.688.000,00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.b.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3.a	127.147.694.624,00	115.848.145.437,00	91,11	121.877.736.579,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.b.3.b	108.005.812,00	0,00	0,00	432.843.448,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21 s/d 22)		127.255.700.436,00	115.848.145.437,00	91,04	122.310.580.027,00
24	BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.b.4				
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya		111.085.853.000,00	110.850.953.000,00	99,79	0,00
26	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan (25)		111.085.853.000,00	110.850.953.000,00	99,79	0,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer (15+19+23+26)		1.924.036.873.194,00	1.894.818.020.797,00	98,48	1.625.297.146.359,00
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c				
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1	10.121.887.000,00	10.121.887.000,00	100,00	0,00
30	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c.2	0,00	0,00	100,00	113.587.517.000,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 30)		10.121.887.000,00	10.121.887.000,00	100,00	113.587.517.000,00
32	JUMLAH PENDAPATAN (7+27+31)		2.128.900.140.657,66	2.121.588.164.366,99	99,88	1.927.712.093.449,89
33	BELANJA	5.1.2				
34	BELANJA OPERASI	5.1.2.a				
35	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.227.330.608.694,16	1.016.008.559.230,00	82,78	1.016.728.197.141,00
36	Belanja Barang	5.1.2.a.2	303.175.636.337,73	280.860.474.082,19	92,64	221.573.412.648,00
37	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	9.721.202,44
38	Belanja Hibah	5.1.2.a.3	96.188.949.300,00	75.221.600.350,00	78,20	120.549.512.335,00
39	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	675.480.000,00	675.480.000,00	100	3.348.000.000,00
40	Jumlah Belanja Operasi (35 s/d 39)		1.627.370.674.331,89	1.372.766.113.662,19	84,35	1.362.208.843.326,44

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015

1

# LAMPIRAN 4

LAPORAN KEUANGAN POKOK  
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



FEMERINTAH KABUPATEN BITAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO	URAIAN	Kod	Anggaran 2016	REALISASI 2016	%	Revisi 2015
				(Audited)		
		5.1				
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	98.224.051.000,00	98.224.054.892,00	100,21	28.117.130.920,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	21.311.829.201,41	20.871.025.333,50	97,99	20.928.232.998,31
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dialokasikan Kembali	5.1.1.a.3	1.852.883.000,00	1.713.060.280,00	92,47	1.601.974.544,70
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dialokasikan Kembali yang	5.1.1.a.4	134.522.324.897,37	141.587.114.138,32	105,27	138.794.144.198,07
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	5.1.1.a.4	214.186.478.679,78	224.196.765.188,87	104,63	216.648.258.669,99
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
9	TRANSFER PEREMINTAH PUSAT - DANA PERMIBANGKAN	5.1.1.b.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.a	31.280.292.000,00	34.014.214.945,00	108,74	23.699.124.000,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.a	41.780.040.000,00	34.207.220.935,00	81,84	38.802.898.252,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1.b	1.228.511.321.000,00	1.228.511.321.000,00	100,00	1.037.911.125.252,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1.c	454.347.399.700,00	402.370.805.555,00	88,59	142.410.000.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1.d	1.655.918.562.700,00	1.599.083.818.435,00	96,58	1.342.813.217.360,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)	5.1.1.b.1	3.470.131.762,700,00	3.364.326.380,435,00	96,92	3.024.255.437,00
16	TRANSFER PEREMINTAH PUSAT - LABAYNYA	5.1.1.b.2				
17	Dana Perimbangan	5.1.1.b.2.1	175.853.852.000,00	175.853.852.000,00	100,00	426.506.796.262,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	5.1.1.b.2	175.853.852.000,00	175.853.852.000,00	100,00	426.506.796.262,00
19	TRANSFER PEREMINTAH PROVINSI	5.1.1.b.3				
20	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3.a	143.681.012.606,50	125.628.082.941,00	87,48	115.648.148.437,00
21	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3.a	102.605.521,40			0,00
22	Dana Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.b.3.b	143.783.618.127,95	125.628.082.941,00	87,38	115.648.148.437,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21 s.d 22)	5.1.1.b.3	287.464.630.734,45	251.256.165.882,00	87,39	231.296.296.874,00
24	BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.b.4				
25	Bantuan Keuangan dan Perantara Provinsi Lainnya	5.1.1.b.4	95.937.880.000,00	96.237.887.030,00	100,00	110.850.953.000,00
26	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan (25 s.d 26)	5.1.1.b.4	95.937.880.000,00	96.237.887.030,00	100,00	110.850.953.000,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer	5.1.1	2.072.553.852.827,95	1.997.581.233.378,80	96,38	1.894.818.626.797,00
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG BAH	5.1.1.c				
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1	18.643.741.720,35	18.643.741.720,35	100,00	10.121.887.000,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Bah (29)	5.1.1.c	18.643.741.720,35	18.643.741.720,35	100,00	10.121.887.000,00
31	JUMLAH PENDAPATAN (7+27+30)	5.1	2.305.383.873.219,88	2.340.251.740.265,22	97,17	2.121.588.164.366,99
32	BELANJA	5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	5.1.2.a				
34	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.408.614.608.624,88	1.029.116.254.398,00	69,37	1.016.008.556.230,00
35	Belanja Barang	5.1.2.a.2	393.894.219.818,00	347.470.574.670,00	88,00	280.860.474.062,19
36	Belanja Hibah	5.1.2.a.3	39.442.838.270,00	21.513.900.000,00	56,71	75.221.600.350,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	675.480.000,00	675.480.000,00	100,00	675.480.000,00
38	Jumlah Belanja Operasi (34 s.d 37)	5.1.2.a	1.542.627.141.719,88	1.404.776.209.068,00	91,06	1.372.766.113.662,19
39	BELANJA MODAL	5.1.2.b				
40	Belanja Tanah	5.1.2.b.1	3.953.100.000,00	372.378.800,00	9,42	1.957.733.990,00
41	Belanja Perawatan dan Mesin	5.1.2.b.2	77.500.444.629,00	62.653.334.049,00	80,75	42.055.977.285,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3	91.730.250.250,00	71.131.929.495,00	77,54	90.198.713.246,00
43	Belanja Jalan, Jembatan dan Jaringan	5.1.2.b.4	535.619.473.982,00	521.079.151.170,00	97,29	373.425.458.848,79
44	Belanja Asst. Tetap Lainnya	5.1.2.b.5	40.544.522.339,00	30.047.498.183,00	74,36	512.001.492,00
45	Belanja Asst. Lainnya	5.1.2.b.6	1.612.767.700,00	1.434.480.600,00	88,95	982.098.000,00
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)	5.1.2.b	751.050.558.909,00	692.718.770.257,00	92,23	508.331.356.779,79
47	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.c				
48	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c.1	2.500.000.000,00	114.991.500,00	4,60	0,00
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	5.1.2.c	2.500.000.000,00	114.991.500,00	4,60	0,00
50	JUMLAH BELANJA (39+46+49)	5.1.2	2.296.177.700.619,88	2.097.609.370.823,00	91,35	1.881.098.064.441,98
51	TRANSFER	5.1.3				
52	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.a				
53	Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.a.1	13.487.885.008,88	9.697.162.597,00	71,90	9.399.205.843,00
54	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.a.2	1.098.707.700,00	966.403.600,00	90,77	817.313.250,00
55	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (53 s.d 54)	5.1.3.a	14.574.592.708,88	10.663.566.197,00	73,30	10.206.520.093,00
56	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.b				
57	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.b.1	259.547.628.600,00	259.547.628.600,00	100,00	180.493.635.160,00
58	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.b.2	652.791.000,00	631.030.000,00	97,22	630.468.500,00
59	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (57 s.d 58)	5.1.3.b	260.500.419.600,00	260.378.658.600,00	99,95	181.324.123.693,00
60	JUMLAH TRANSFER (52 + 59)	5.1.3	275.075.012.309,88	271.062.224.797,00	98,54	191.530.643.786,00
61	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50+60)	5.1	2.571.252.712.928,76	2.368.672.195.620,00	92,12	2.072.628.708.227,98
62	SURPLUS/ DEFISIT (31-61)	5.1	(265.868.839.709,66)	(128.420.455.354,78)	48,30	48.959.456.139,01
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4				
64	Penggunaan S/LPA	5.1.4.1.a	284.512.581.430,01	284.511.344.286,01	100,00	225.163.176.125,00
65	Pencoran Dana Cadangan	5.1.4.1.b	-	-	-	10.173.792.210,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah	5.1.4.1.d	-	162.022.803,00	100,00	217.556.846,00
67	Jumlah Penerimaan (64 s.d 66)	5.1.4	284.512.581.430,01	284.673.367.089,01	100,06	235.554.528.181,00
68	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	5.1.4.2.a	-	-	-	1.402.860,00
70	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.b	18.643.741.720,35	18.643.741.720,35	100,00	1.462.880,00
71	Jumlah Pengeluaran (70 s.d 71)	5.1.4.2	18.643.741.720,35	18.643.741.720,35	100,00	1.462.880,00
72	PEMBAYARAN NETTO (67 - 72)	5.1.4	265.868.839.709,66	266.029.625.368,66	100,06	235.553.123.281,00
73	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62+73)	5.1.4.5	-	137.669.170.913,96	100,00	284.512.581.430,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



LAMPIRAN 5



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	Anggaran 2017	Realisasi 2017	(%)	Realisasi 2016
1	PENDAPATAN	5.2.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.1.1	69.491.000.000,00	72.898.485.986,00	104,90	60.225.564.882,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.1.2	24.086.189.226,00	22.794.307.583,20	94,64	20.571.025.213,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.3	2.070.315.677,00	1.750.815.677,80	84,57	1.713.060.985,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.1.4	218.693.051.626,00	225.435.333.902,35	103,08	141.597.114.118,37
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		314.340.556.529,00	322.878.943.149,35	102,72	224.106.765.168,87
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.2.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.1.a	31.339.484.000,00	26.922.195.227,00	85,91	34.014.214.945,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.2.1.2.1.b	48.669.774.376,00	34.082.806.994,00	70,03	34.107.276.935,00
13	Dana Alokasi Umum	5.2.1.2.1.c	1.108.687.006.000,00	1.108.687.006.000,00	100,00	1.128.511.321.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.2.1.2.1.d	410.095.952.000,00	373.933.107.094,00	91,18	402.370.805.555,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.598.792.216.376,00	1.543.625.115.315,00	96,55	1.599.003.618.435,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.2.1.2.2				
18	Dana Penyesuaian	5.2.1.2.2.a	221.178.229.000,00	221.178.229.000,00	100,00	175.933.652.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)		221.178.229.000,00	221.178.229.000,00	100,00	175.933.652.000,00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.2.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.3.a	144.497.757.417,00	157.631.493.707,00	109,09	125.626.082.941,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.2.1.2.3.b	108.005.812,00	0,00	0,00	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21 s/d 22)		144.605.763.229,00	157.631.493.707,00	109,01	125.626.082.941,00
24	BANTUAN KEUANGAN	5.2.1.2.4				
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya		62.499.100.000,00	62.499.100.000,00	100,00	96.937.880.000,00
26	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan (25)		62.499.100.000,00	62.499.100.000,00	100,00	96.937.880.000,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer (15+19+23+26)		2.027.075.308.605,00	1.984.933.938.022,00	97,92	1.997.501.233.376,00
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.1.3				
29	Pendapatan Hibah	5.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	18.643.741.720,35
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29)		0,00	0,00	0,00	18.643.741.720,35
31	JUMLAH PENDAPATAN (7+27+30)		2.341.415.865.134,00	2.307.812.881.171,35	98,56	2.240.251.740.265,22
32	BELANJA	5.2.2				
33	BELANJA OPERASI	5.2.2.1				
34	Belanja Pegawai	5.2.2.1.1	972.848.254.876,88	926.439.303.277,00	95,23	1.035.116.254.396,00
35	Belanja Barang	5.2.2.1.2	492.766.043.903,00	459.210.921.869,06	93,19	347.470.574.670,00
36	Belanja Hibah	5.2.2.1.3	60.994.416.417,00	55.354.212.308,00	90,75	21.513.900.000,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.2.2.1.4	7.982.500.000,00	6.513.700.000,00	81,60	675.480.000,00
38	Jumlah Belanja Operasi (34 s/d 37)		1.534.591.215.196,88	1.447.518.137.454,06	94,33	1.404.776.209.066,00
39	BELANJA MODAL	5.2.2.2				
40	Belanja Tanah	5.2.2.2.1	1.911.000.000,00	202.127.000,00	10,58	372.376.800,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.2	51.159.471.790,00	43.722.637.336,00	85,46	62.653.334.049,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.2.3	67.347.309.918,00	62.917.518.010,00	93,42	71.131.929.455,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.2.4	478.161.271.902,00	460.367.062.792,50	96,28	521.079.151.170,00
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.2.5	29.618.602.280,00	24.358.173.813,00	82,24	36.047.498.183,00

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TANGGAL 19 JULI 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	76.399.128.670,00	89.224.336.207,80	116,79	72.896.485.986,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	22.865.178.372,00	23.198.217.113,00	101,46	22.794.397.583,20
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.088.484.019,50	1.756.190.019,50	84,09	1.750.815.677,80
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	132.619.101.323,38	138.274.502.466,92	104,26	225.433.333.002,35
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		233.971.892.347,51	252.483.245.801,27	107,90	322.878.943.149,35
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.a	30.107.294.755,00	34.042.193.334,00	79,84	28.932.198.227,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.b	75.998.391.208,00	83.601.164.013,00	110,00	34.082.906.994,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.c	1.109.812.783.000,00	1.109.812.753.000,00	100,00	1.108.687.006.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.d	495.208.318.163,00	382.943.194.822,00	94,28	373.933.107.094,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.621.126.697.126,00	1.599.499.308.169,00	98,67	1.543.625.115.315,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.a	199.355.009.000,00	199.355.009.000,00	100,00	221.178.229.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya (16)		199.355.009.000,00	199.355.009.000,00	100,00	221.178.229.000,00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.a	162.765.578.091,00	157.297.885.936,00	96,64	157.631.493.707,00
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (19 s/d 20)		162.765.578.091,00	157.297.885.936,00	96,64	157.631.493.707,00
22	BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.2.4				
23	Bantuan dari Pemerintah Provinsi lainnya	5.1.1.2.4.1	58.394.900.000,00	58.144.900.000,00	99,59	62.499.100.000,00
24	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan (23)		58.394.900.000,00	58.144.900.000,00	99,59	62.499.100.000,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer		2.041.642.144.217,00	2.014.497.826.105,00	98,67	1.984.933.938.022,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	86.142.600.000,00	85.179.884.330,82	98,88	0,00
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		86.142.600.000,00	85.179.884.330,82	98,88	0,00
29	Jumlah PENDAPATAN (7+8+14+25+26)		2.361.786.634.664,51	2.382.136.156.337,09	99,55	2.387.812.081.171,35
30	BELANJA	5.1.2				
31	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.012.739.884.343,91	950.509.009.296,23	93,84	938.439.303.277,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	137.296.708.750,27	496.349.709.686,11	359,82	439.310.021.869,00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	62.992.346.530,00	49.603.445.730,00	78,93	55.354.212.308,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	5.735.000.000,00	5.670.227.300,00	98,87	6.313.700.000,00
36	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 35)		1.618.768.829.624,18	1.902.332.488.012,34	117,53	1.493.817.327.454,00
37	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
38	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	464.400.000,00	463.900.000,00	99,91	202.127.000,00
39	Belanja Perawatan dan Mesin	5.1.2.2.2	60.393.792.315,00	53.442.324.791,00	88,49	43.722.637.334,00
40	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	148.600.384.362,00	78.236.307.668,14	52,68	62.917.518.010,00
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	5.1.2.2.4	313.290.211.704,00	263.070.524.173,00	83,97	460.787.062.782,30
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.023.433.300,00	11.949.962.391,25	85,23	24.358.173.813,00
43	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.591.125.000,00	1.541.631.000,00	96,83	1.876.430.000,00
44	Jumlah Belanja Modal (38 s/d 43)		838.694.874.681,00	492.772.796.052,41	58,77	593.444.438.961,30
45	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
46	Belanja Tak Terduga		3.712.582.900,00	916.000,00	0,02	781.494.500,00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga (46)		3.712.582.900,00	916.000,00	0,02	781.494.500,00
48	Jumlah BELANJA (36+44+47)		2.158.886.996.325,18	1.912.507.184.070,77	88,63	2.041.744.840.965,30
49	TRANSFER	5.1.3				
50	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1				
51	Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	11.146.617.147,00	11.123.937.822,00	99,80	9.506.827.643,00
52	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	986.000.750,00	913.492.500,00	92,65	973.411.180,00
53	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (51 s/d 52)		12.132.617.897,00	12.037.429.322,00	99,23	10.480.238.823,00

## LAMPIRAN 7

### BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Fairuz Humaida  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 05 Mei 1996  
Alamat : Jl. Singolodro No. 14 Blitar  
E-mail : [fairuz\\_humaida@yahoo.com](mailto:fairuz_humaida@yahoo.com)  
Instagram : @fairuzhumaida

#### **Pendidikan Formal**

2002-2003 : TK Islam Sabilillah Malang  
2003-2005 : SD Islam Sabilillah Malang  
2005-2009 : MI Perwanida Blitar  
2009-2012 : MTsN 1 Blitar  
2012-2015 : MAN 2 Malang  
2015-2020 : Jurusan Akuntansi UIN Maliki Malang

#### **Pendidikan Nonformal**

2015-2016 : Program Pengembangan Bahasa Arab UIN Maliki Malang  
2016 : ELC (English Language Center) UIN Maliki Malang